

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak era reformasi, pemerintah sudah menerapkan sistem tata pengelolaan yang baik dalam pemerintahan. Kondisi itu terus menerus mengalami perkembangan, dimulai dari dorongan untuk masyarakat dalam penyampaian aspirasi, kepercayaan yang diciptakan untuk masyarakat melalui informasi yang tersedia secara akurat, upaya peningkatan tanggungjawab terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan bentuk upaya pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik atau yang disebut dengan *good governance*. *Good governance* adalah sesuatu yang menjadi perhatian untuk masyarakat atas pemerintahan yang mengerjakan tata pengelolaan keuangan agar terwujud pelayanan publik yang berkualitas dan bersih (Agung dan Mulyani, 2020).

Namun harapan itu tidak berjalan dengan lancar begitu saja, karena saat ini masih ada kasus seperti korupsi, suap menyuap, kurangnya integritas, kecurangan dan lain-lain. Penyelewengan dana memberi keuntungan pada oknum tertentu yang mempunyai wewenang dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban pemakaian anggaran kepada publik. Penyelewengan dana tersebut dapat memberi dampak yang tidak baik pada kondisi keuangan dan layanan pemerintah kepada masyarakat menimbulkan ketidakstabilan

(Oktaviani dan Sari, 2020). Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji baik dilihat dari pandangan sosial maupun agama karena korupsi dapat merugikan masyarakat dan negara dalam segi ekonomi. Di dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bahwa manusia terutama umat muslim tidak boleh melakukan praktik korupsi. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Tindakan korupsi menyebabkan pemerintah mempunyai masalah yang serius, sehingga belum terciptanya *good governance* sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Di kutip dari situs <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/18053871/kpk-duga-kerugian-kasus-korupsi-pembangunan-stadion-mandala-krida-yogyakarta>, negara mengalami kerugian akibat adanya korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp31,7 miliar. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pendidikan khusus (Disdikpora) ini dilakukan dengan menunjuk suatu oknum membuat perencanaan estimasi dana dengan melakukan *mark up* dana untuk memperbaiki stadion mandala krida. Masalah ini membuat pembangunan

mengalami keterlambatan dan juga kerugian untuk rakyat dan negara. Karena hanya memberi keuntungan bagi para oknum yang terlibat. Dengan maraknya kasus korupsi yang masih terjadi di Indonesia, seluruh warga seharusnya dibekali pengetahuan mengenai ancaman dan bahaya kasus korupsi dan bagaimana upaya untuk mencegahnya.

Dalam postingan yang di unggah oleh Humas DIY (2022) di situs Jogjaprovo.go.id, korupsi dapat mengurangi kapabilitas institusi pemerintahan karena ada prosedur dan aturan yang diabaikan, serta para pegawai atau pejabat yang terpilih bukan berdasarkan prestasi. Sri Sultan mengatakan bahwa, “Korupsi mendelegitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, terutama *trust* dan toleransi, sehingga menghambat proses demokrasi dan penyelenggaraan *good governance*”. Beliau juga menegaskan bahwa tidak akan membela dan mengampuni para ASN dan pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan tindak korupsi. Dilihat dari kondisi ini, pemerintah daerah maupun pusat harus menindaklanjuti dan melakukan pembenahan dalam penerapan *good governance* di lembaga manapun. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, bahkan transparansi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Karena laporan keuangan merupakan elemen yang berharga dalam keterbukaan atas keuangan yang dikelola (Agung dan Mulyani, 2020).

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban kerja yang sudah dilaksanakan dalam aspek keuangan selama periode anggaran kepada pengguna

laporan keuangan (Firmansyah dan Sinambela, 2020). Tujuan umum dari laporan keuangan untuk memberi informasi tentang keuangan dan arus kas yang berguna untuk para pemakai guna mengevaluasi penggunaan sumber daya yang digunakan oleh suatu organisasi dalam aktivitasnya misalnya ketika laporan keuangan pemerintah dibuat, itu akan berguna untuk pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan hasil dari proses pencatatan, mengolah data, dan menyajikan informasi mengenai transaksi yang sudah dilakukan, proses ini bernama siklus akuntansi. Karena laporan keuangan digunakan sebagai pembuktian dan hasil pertanggungjawaban yang disusun oleh pembuat laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan untuk menyediakan data yang relevan dan dapat dipercaya, serta pengguna dapat memahami dengan mudah.

Untuk membuat laporan keuangan memenuhi karakteristik yang sudah disebutkan, harus ada pegawai yang bekerja untuk pengelolaan keuangan serta pelaporannya. Selain itu, pembuatan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan peningkatan sumber daya manusia. Lebih khususnya manusia yang mumpuni dibidang akuntansi karena kemampuannya dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai terhadap pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Laporan keuangan yang memiliki kualitas akan dapat diwujudkan apabila mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang mendukung dan mempunyai kemampuan yang baik untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam pencapaian tujuan. Kemampuan dan

kapasitas sumber daya manusia yang minim akan mengakibatkan pengaruh yang kurang baik terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Faadillah dan Yuhertiana (2021) laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas merupakan suatu ciri laporan kualitatif dari proses akuntansi dengan penyajian posisi keuangan, kinerja, dan informasi dari pemerintahan daerah, dimana ada faktor transparansi dan akuntabilitas yang akan saling berpengaruh. Dimana jika kualitas laporan keuangan pemerintah semakin tinggi, maka transparansi dan akuntabilitasnya akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Adapun suatu lembaga yang memeriksa laporan keuangan dinamakan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang tersendiri. Tugas dari BPK seperti melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara yang diamanahkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara.

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap mutu laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal yang baik. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses integral pada aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan oleh atasan dan bawahannya untuk berkeyakinan terhadap tujuan organisasi atas tindakan yang efisien dan efektif, kepatuhan terhadap peraturan undang-undang, keamanan aset, dan keandalan laporan keuangan. Menurut Mene et al (2018) sistem

pengendalian internal memiliki unsur-unsur seperti informasi dan komunikasi, penilaian risiko, pemantauan, dan lingkungan pengendalian yang digunakan sebagai metode pengawasan dan tolak ukur tujuan organisasi itu tercapai dengan cara yang efektif dan efisien untuk perwujudan tata pemerintahan yang baik atau disebut dengan pengawasan intern. Selain adanya pengaruh dari sistem pengendalian internal, adanya teknologi informasi juga mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan layanan sektor publik. Teknologi informasi selain sebagai teknologi hardware dan software untuk menyimpan informasi juga berfungsi untuk alat penyebaran informasi (Ridwan et al., 2021). Teknologi informasi dapat dipakai sebagai media hiburan diwaktu senggang, tetapi tidak selalu dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat guna membantu memudahkan manusia dalam hal pekerjaan, sehingga kehadiran teknologi informasi yang semakin berkembang tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Dengan itu, pemerintah seharusnya melakukan peningkatan terhadap kemampuan para pegawai seperti mengikuti pelatihan teknologi informasi. Dan juga situasi ini harus dimudahkan lagi dengan biaya yang terjangkau dan kapabilitas yang baik (Chodijah et al., 2018).

Hasil penelitian Mene et al., (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Ridwan et al., (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Shinta et al.,

(2020) yang terkait dengan sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan terkait dengan kompetensi sumber daya manusia yang tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gita Saraswati dan Budiasih, 2019) menunjukkan bahwa SPI mempunyai pengaruh positif dan searah terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian mengenai *good governance* yang diteliti oleh Agung dan Mulyani (2020) menunjukkan bahwa *good governance* mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dibuat oleh Shinta, Sri, dan Sriyono (2020). Berkaitan dengan variabel independennya yaitu tentang *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal sudah banyak dilakukan, namun ditemukan hasil penelitian yang tidak konsisten terkait variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan replika penelitian Shinta, Sri, dan Sriyono (2020) digabungkan dengan penelitian Gita Saraswati dan Budiasih (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan dan penggantian variabel. Variabel yang ditambahkan yaitu sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen. Teknologi

informasi sangat berguna bagi kehidupan bermasyarakat, namun sayangnya kemajuan yang diterima tidak disertai sikap adaptif dan budaya hidup yang dibangun sesuai dengan perkembangan teknologi yang berlangsung atau terbilang adanya kesenjangan yang terjadi antara perkembangan teknologi dan sikap adaptif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi masih terbilang konsumtif, masyarakat hanya memakai teknologi tetapi belum memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien. Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, *Good Governance*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

4. Apakah sistem pengendalian internal mampu memperkuat pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah sistem pengendalian internal mampu memperkuat pengaruh positif *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah sistem pengendalian internal mampu memperkuat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa sistem pengendalian internal mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa sistem pengendalian internal mampu memperkuat pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa sistem pengendalian internal mampu memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan literatur mengenai peranan pemanfaatan teknologi informasi, *good governance*, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal bagi para pembaca. Dan juga, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah sehingga dapat membantu untuk peningkatan kualitas laporan keuangan.